

**PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA KABUPATEN EMPAT LAWANG
MELALUI PELATIHAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
OLEH BPKP DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017**

Hentry Agustina¹, Yunindyawati², Safira Soraida²

¹Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

²Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This research aims to analyse the empowering implementation of village apparatus through Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sisiteudes) training in Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) office on Empat Lawang district in 2017. Technique of checking and validating data its triangulation technique. Triangulation technique means the comparison and checking the informant truth in qualitative research. Shortly this research result is the empowering of village apparatus through the training of Siskeudes Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (8PKP) once in Palembang ii through t6e technology guidance that made by BPKP to improving society in the village especially on Technology.

INFORMASI ARTIKEL	
Sejarah Artikel	:
Diterima	: 01 Desember 2019
Disetujui	: 01 Januari 2020
Alamat Email: yunindyawati@fisip.unsri.ac.id	
Correspondence Author: Yunindyawati	
ISSN (PRINT) : 1412 – 1411	
ISSN (ONLINE) : 2722-7057	

Keyword: BPKP, Village Apparams. Society Empowering

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan aparatur desa melalui pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sisiteudes) di kantor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Kecamatan Empat Lawang Tahun 2017. Teknik pemeriksaan dan validasi data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi berarti membandingkan dan memeriksa kebenaran informan dalam penelitian kualitatif. Singkatnya hasil penelitian ini adalah pemberdayaan aparatur desa melalui pelatihan Siskeudes yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Palembang II melalui pembinaan teknologi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa khususnya tentang Teknologi.

Kata kunci: BPKP, Perangkat desa, Pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan suatu proses belajar hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*) (Mulyawan, 2016). Dalam hal ini, masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan adalah para perangkat desa, yaitu orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan desa beserta sistem administrasinya.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014), pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa (Bender, 2016).

Dalam upaya pengembangan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sejak bulan Juli 2016 pemerintah merencanakan program

satu desa satu milyar. Dimana dana untuk program tersebut diadopsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (Farida et al., 2021). Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia akan memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa (Usman & Habib, 2016). Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber. Jadi setiap desa mendapatkan dana 1 Milyar setiap tahun, transfer dana tersebut hanya untuk keperluan desa bukan untuk kepentingan pribadi (Aziz, 2016).

Setelah resmi diterapkan program satu desa satu milyar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Empat Lawang masing-masing desa di kabupaten tersebut telah menerima dana sebesar satu milyar yang diperuntukkan untuk pengembangan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terdapat 146 desa yang termasuk dalam lingkup wilayah Kabupaten Empat Lawang yang telah menerima dana satu desa satu milyar dari pemerintah dengan tujuan agar dana tersebut dikelola sebagaimana mestinya. Namun, pada kenyataannya dana yang dialokasikan untuk desa tersebut tidak sepenuhnya dikelola dengan baik serta tidak adanya transparansi dana dari pemerintah kepada masyarakat setempat. Banyak terdapat kejanggalan

dalam pemanfaatan dana desa serta penyelewengan dana desa oleh aparat pemerintahan desa setempat.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah ke tidak transparansi keuangan desa serta penyelewengan dana desa, pihak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menerapkan sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Febriadmadja, 2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2007 (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes dibuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan

Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015 dan telah diresmikan oleh pihak BPKP pada awal tahun 2016. Pada tahun 2017, program Siskeudes ini telah disosialisasikan mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan sampai ke pemerintahan desa. Setelah dilakukan sosialisasi program, maka tahap selanjutnya ialah melakukan pelatihan sistem aplikasi Siskeudes (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007).

Provinsi Sumatera Selatan sendiri menargetkan 100% desa di wilayah Sumatra Selatan mampu mengimplementasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Khusus di Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat daftar implementasi aplikasi Siskeudes pada tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 1. Implementasi Aplikasi Siskeudes di kabupaten Empat Lawang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Talang Padang	13		13
2	Pesemah Air Keruh	15		15
3	Lintang Kanan	16		16
4	Pendopo	20	4	16
5	Muara Pinang	22		22
6	Ulu Musi	14		14
7	Saleng	10		10
8	Sikap Dalam	11		11
9	Pendopo Barat	10		10
10	Tebing Tinggi	22	3	19
	Jumlah	153	7	146

Sumber: Data BPKP Palembang Sumatra selatan Tahun 2017

Dari Tabel 1. menunjukkan bahwa seluruh desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang berjumlah 153 desa tetapi ada 7 yang sudah menjadi kelurahan. Kelurahan tersebut tidak ikut melakukan pelatihan aplikasi karena kelurahan termasuk ke

struktur pemerintahan kecamatan bukan termasuk struktur pedesaan, sehingga keseluruhan jumlah desa di Kabupaten Empat lawang berjumlah 146 desa. Saat ini keseluruhan desa tersebut sudah melakukan pelatihan aplikasi dan sudah di terapkan di

desa masing-masing dan mulai melaksanakan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dan tidak menggunakan pelaporan keuangan desa secara manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai Pemberdayaan Perangkat Desa Melalui Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh BPKP di Kabupaten Empat Lawang.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pemberdayaan Perangkat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan (Noor, 2011). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan dalam perspektif pembangunan ini di sadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam upaya dalam meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmateri, sebagai suatu strategi pembangunan pemberdayaan dapat di artikan sebagai kegiatan pembantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan menstransfer daya diri lingkungan (Alfitri, 2011).

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai *Power* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan mencakup enam hal berikut:

1. *Learning by doing*. Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus menerus dampaknya dapat dilihat.
2. *Self selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah kedepan.
3. *Self development and coordination*. Artinya memdorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
4. *Self evaluation*. Pemberdayaan harus mampu mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas
5. *Problem solving*. Pemberdayaan harus mampu memberikan arti terjadinya, pemecahan masalah yang di rasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
6. *Self decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Alfitri, 2011).

Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana perangkat desa dilibatkan dalam proses pembangunan yang ada di desa, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan

tersebut oleh masyarakat. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya *power* yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Widodo, 2018).

Pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes di kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, memahammi teknologi yang ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan perangkat desa juga dapat memperbaiki sistem pemerintahan yang selama ini pelaporan keuangan masih menggunakan manual sedangkan sekarang sudah menggunakan teknologi yang canggih dan tentunya juga mempermudah sistem pemerintahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelatihan Aplikasi Siskeudes

Faktor penghambat dari pihak BPKP sendiri ada beberapa aspek diantaranya: Dana, Tempat, Waktu pelatihan dan peserta pelatihan yang masih Gaptেক. Dana sendiri mereka bingung harus mendapatkannya dari mana sedangkan pihak Kabupaten tidak memberikan dana dan akhirnya sedikit terkendala. Melihat kendala ini akhirnya pihak BPKP memutuskan untuk setiap desa yang ada di Kabupaten memberikan sejumlah Dana Desa sebesar Rp.7.000.000 per desa untuk terlaksananya pelatihan Aplikasi Siskeudes ini. Dari faktor penghambat tempat dan waktu, pihak BPKP harus membagi waktu kerja mereka untuk

melaksanakan pelatihan Aplikasi Siskeudes. Sedangkan tempat pelatihan pihak BPKP punya solusi untuk tempat pelatihan di sebuah Hotel yang ada di Kota Palembang, namun ternyata ada beberapa kendala dari yaitu besarnya Dana untuk biaya hotel. Akhirnya solusi terakhir tempat pelatihan di Aula gedung BPKP Palembang, hal ini untuk penghematan biaya sewa tempat.

Sedangkan faktor penghambat lainnya yaitu para peserta pelatihan yang dominan mayoritas masih banyak yang Gaptেক namun ada sebagian yang sudah lebih dulu mengetahui dan paham tentang komputer. Peserta pelatihan semuanya berasal dari desa dan tinggal di desa oleh karena itu, ada beberapa dari mereka yang masih sangat gagap teknologi bahkan untk menghidupkan komputer saja mereka masi bertanya ke pada panitia pelatihan. Melihat kondisi ini sungguh sangat miris, teknologi sudah ada dan canggih namun masyarakatnya yang masih belum bisa mengendalikan dengan baik, jangan sampai teknologi yang menguasai masyarakat tetapi sebaliknya masyarakatlah yang dapat mampu menguasai teknologi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan dilingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di pemerintah kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada

Deputi kepala BPKP bidang penyelenggaraan keuangan daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance (QA)* oleh tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta (Juardi et al., 2018).

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembangan aplikasi pilikasi. Pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh pemerintah sehingga dapat diterapkan kepada seluruh desa yang ada pada pemerintahan yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan validasi dan Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP (Puspawijaya & Siregar, 2016).

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori dalam penelitian ini adalah teori dari Hogan (Kurniawan, 2015) yaitu menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowring experience*)
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadinya pemberdayaan dan ketidakberdayaan (*discus reasons for depowering empowerment*)

3. Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (*identifty one problem of projek*)
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (*identifty useful powerbased*)
5. Mengembangkan rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop of implementation plans*)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif (Sugiyono, 2015). Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) di Kota Palembang. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BPKP beserta Stap jajaran yang aktif serta kepala desa dan perangkat desa sebagai informan ahli untuk meminta umpan balik atas pernyataan informan.

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari semua pihak BPKP yang terllibat dalam pelatihan yaitu Kepala dan Wakil Kepala BPKP, Korwas BPKP, Kepala Kasubag dan Kepala Kepegawaian. Sedangkan informan pendukung berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Kepala Desa setempat, kepala dinas DPMDP3A serta perangkat desa yang mengikuti pemberdayaan melalui pelatihan aplikas Siskeudes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberdayaan Perangkat Desa Melalui Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa di laksanakan di kantor BPKP yang di ikuti oleh seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Selatan. Setiap Kecamatan mempunyai beberapa desa, dan satu desa di wakili oleh salah satu perangkat desa yang akan diberikan pemberdayaan yaitu melalui pelatihan aplikasi Siskeudes. Di kabupaten Empat Lawang sendiri tercatat 146 desa yang sudah mengikuti pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes di kantor BPKP pada tanggal 17 Oktober 2017.

Pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes oleh BPKP di Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan pemberdayaan dibagi dengan beberapa cara diantaranya: Aktor pelaksanaan pemberdayaan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena berdasarkan data tahun sebelumnya banyak sekali dana desa disalahgunakan oleh pemerintah desa setempat untuk kepentingan pribadi mengingat dana desa yang di berikan begitu besar yaitu satu desa satu milyar. Untuk mengantisipasi terjadinya masalah ke tidak transparansi keuangan desa serta penyelewengan dana desa, pihak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan menerapkan sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Siskeudes dibuat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015 dan telah diresmikan oleh pihak BPKP pada awal tahun 2016. Pada tahun 2017, program Siskeudes ini telah disosialisasikan mulai dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai ke pemerintahan desa.

Selanjutnya program BPKP dalam melakukan pemberdayaan, Pemilihan instruktur seseorang sebagai pelatih (Instruktur) harus didasarkan pada tingkat penguasaan materi atau disebut dengan tingkat ke profesionalan yang cukup tinggi. selanjutnya tujuan maupun manfaat pemberdayaan perangkat desa diataranya: Meningkatkan ketrampilan (*skill*) masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup didalam bermasyarakat dan Dari sisi lembaga atau organisasi Menaikkan produktivitas pegawai Pengisian data umum desa Untuk mengetahui seberapa jauh pengisian data umum desa untuk penyusunan anggaran APBDes. Tahap berikutnya sasaran pemberdayaan yaitu perangkat desa karena perangkat desa yang mempunyai tanggung jawab masalah administrasi keuangan desa untuk menjadi efektif dan efisien dan langkah langkah pemberdayaan. pelatihan selanjutnya persiapan pelatihan. Ketika semua sudah dipersiapkan semuanya selanjutnya yaitu pelatihan penyusunan Anggaran APBDes ke dalam

Aplikasi Siskeudes dan tentunya pelatihan ini mempunyai tujuan serta manfaat kedepanya bagi masyarakat desa

terutama perangkat desa. Dalam pelatihan ini selain meningkatkan pemahaman atau skill masyarakat di bidang teknologi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari siklus teori Hogan akan tergambar mengapa Hogan meyakini bahwa program pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes yang terjadi Kabupaten Empat lawang pada tahun 2017 proses pemberdayaan tidak berhenti disuatu titik tertentu tetapi lebih merupakan sebagai upaya kesinambungan untuk meningkatkan skill maupun daya dari perangkat desa. intinya pemberdayaan ini tidak bisa dilaksanakan hanya dalam sekali tetapi sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan secara terus menerus. Meskipun Hogan memfokuskan tulisanya pada pemberdayaan individu, tetapi model pemberdayaan yang bersifat *on going* proses tersebut juga dapat diterapkan pada level komunitas ataupun organisasi.

Dalam konteks kesejartraan masyarakat, upaya yang dijelaskan diatas tentunya terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ke tingkat yang lebih baik yang tentunya harus mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor penyebab suatu masyarakat atau komunitas kurang berdaya. Dalam hal ini masyarakat miskin yang tidak mampu mengembangkan potensi mereka serta kekuatan yang mereka miliki untuk eksistensi masyarakat. Selain faktor kurangnya ekonomi masyarakat yang menjadi masyarakat tidak berdaya juga faktor dari pemerintah desa dengan

masyarakatnya misalnya dalam hal fasilitasdesayang kurang memadai sehingga masyarakat tidak bisa menggasah potensi atau keahlian mereka. Tetapi setelah adanya pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak BPKP masyarakat menjadi sangat antusias dalam mengikuti pelatihan pemberdayaan ini dan juga pemberdayaan dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan seperti yang diungkap teori pemberdayaan menurut Hogan.

Kondisi perangkat desa yang proses pemberdayaan sudah berlangsung secara berkesinambungan tidak hanya berhenti di pelatihan yang dilaksanakan oleh BPKP saja tetapi perangkat desa melanjutkan pelatihan tersebut di Kecamatan masing-masing yang sudah diberikan koordinator untuk membimbing pengoprasian aplikasi Siskeudes di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada baik *internal* maupun *eksternal* yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada terutama di administrasi keuangan desa. Dalam hal ini tergambar bahwa proses pemberdayaan merupakan *on going proses* bukan berarti meniadakan masalah akan tetapi pemberdayaan ini mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat bersifat proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Aplikasi Siskeudes

Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat ataupun kendala dalam proses pemberdayaan melalui pelatihan aplikasi Siskeudes oleh BPKP di Kabupaten Empat Lawang. Tentunya kendala ini menjadi penghambat berjalanya sebuah pelatihan atau suksesnya sebuah rencana. Kendala tersebut diantaranya faktor kendala dari pihak BPKP selaku Badan penyelenggara dan pelaksana dan faktor kendala dari masyarakat atau perangkat desa yang mengikuti pelatihan aplikasi ini.

Kendala dari pihak Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Kota Palembang, yaitu dana, tempat dan waktu. Faktor penghambat dana sendiri mereka binggung harus mendapatkannya dari mana sedangkan pihak Kabupaten tidak memberikan dana dan akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat. Melihat kendala ini akhirnya pihak BPKP memutuskan untuk setiap desa yang ada di Kabupaten memberikan sejumlah Dana Desa untuk terlaksananya pelatihan Aplikasi Siskeudes ini. Sedangkan tempat pelatihan pihak BPKP punya solusi untuk tempat pelatihan di sebuah hotel yang ada di Kota Palembang, namun ternyata ada beberapa kendala dari yaitu besarnya Dana untuk biaya hotel. Akhirnya solusi terakhir tempat pelatihan di Aula gedung BPKP Palembang, hal ini untuk penghematan biaya sewa tempat.

Lalu kendala dari pemerintah desa (kepala desa) dan perangkat desa (peserta pelatihan), yaitu kurangnya sarana dan prasarana menjadi penghambat dalam pemberdayaan karena sarana dan prasarana masih sangat minim sehingga tidak memungkinkan berjalanya suatu proses pemberdayaan. Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur desa sehingga masih kurangnya kemampuan untuk membimbing masyarakat lainya untuk maju. Keterbatasan anggaran biaya untuk Bimtek atau pelatihan masih menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan ini. Lemahnya koordinasi antar sektor atau lemahnya koordinasi dari pihak pemerintah desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang sedangkan partisipasi merupakan fondasi utama dalam menyukkseskan program pemberdayaan .

Kemampuan sumber daya manusia ditingkat desa masih terbatas ini merupakan kendala terbesar dalam pemberdayaan. Kemampuan Sumber Daya Manusia di tingkat desa yang masih terbatas sehingga dampak yang ditimbulkan asih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam proses pemberdayaan melalui pelatihan aplikasi Siskeudes oleh BPKP di Kabupaten Empat Lawang. Tentunya faktor pendukung menjadi ini menjadi sukses berjalanya sebuah pelatihan atau suksesnya sebuah rencana. Faktor pendukung tersebut diantaranya faktor pendukung dari pihak BPKP selaku Badan penyelenggara dan pelaksana dan faktor pendukung dari

masyarakat atau perangkat desa yang mengikuti pelatihan aplikasi ini.

Adapun faktor pendukung dari pihak Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Kota Palembang, yaitu Pelatih yang berpengalaman dan ulet. Keuletan pelatih menjadi faktor yang sangat penting karena peran seseorang pelatih dalam pelatihan sangat diutamakan, Antusiasme dan semangat yang tinggi ini muncul karena beberapa faktor yang menjadi motivasi mereka mengikuti pelatihan aplikasi Siskeudes antara lain untuk memperbaiki ekonomi keluarga, agar memiliki keahlian dalam bidang teknologi sebagai bekal hidup, sebagai bekal untuk mencari pekerjaan atau perekonomian yang layak, Adanya kerjasama (kooperatif) antara pelatih dan peserta pelatihan yang baik, dan ketersediaan bahan dan alat, beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelatihan aplikasi ini antara lain laptop, mikropon, sound sistem, infokus, kursi, meja, dan bahan ATK lainnya. Pemberian uang transport bagi peserta untuk menjadikan motivasi tersendiri bagi mereka dan memberikan tanggung jawab bagi para peserta.

Lalu faktor pendukung dari pemerintah desa (kepala desa) dan perangkat desa (peserta pelatihan), yaitu Tersedianya tenaga instruktur atau pelatih yang siap membantu menyukseskan pelatihan aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di kantor BPKP Kota Palembang beberapa periode yang lalu, dan dengan adanya pelatihan aplikasi, Siskeudes ini yang mana pelaporan keuangan desa masih manual dan pihak

BPKP maupun dari pemerintah desa harus turun lapangan langsung untuk melihat kondisi keuangan desa dan sarana prasarana yang ada di desa maupun pembangunan infrastruktur desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari Pemberdayaan Perangkat Desa Melalui Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Oleh BPKP Di Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes di tingkat Kabupaten di selenggarakan oleh pihak BPKP sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pada saat pelatihan beberapa pekan yang lalu. Sedangkan di pihak BPKP pelaksanaan pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan Aplikasi sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh pelatih yang berpengalaman, sabar dan ulet. Faktor pengalaman, kesabaran dan keuletan pelatih menjadi faktor yang sangat penting karena peran seorang pelatih dalam pelatihan aplikasi Siskeudes sangat utama. Pengalaman maupun kesabaran dan keuletan pelatih sangat dibutuhkan agar pelatihan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Faktor pendukung terlaksananya pelatihan ini selanjutnya adalah antusiasme dan semangat mengikuti pelatihan. Para peserta pelatihan (perangkat desa) yang mengikuti pelatihan aplikasi Siskeudes

memiliki antusiasme dan semangat yang tinggi. Antusiasme dan semangat yang tinggi ini muncul karena beberapa faktor yang menjadi motivasi mereka mengikuti pelatihan aplikasi Siskeudes. Walaupun sebenarnya mereka belum memahami teknologi atau bisa dikatakan masyarakat yang masih Gaptek, sedangkan pelatihan ini sudah berbasis teknologi yang canggih.

Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung terlaksananya pelatihan aplikasi Siskeudes berjalan dengan lancar karena adanya kerjasama (kooperatif) antara pelatih dan peserta pelatihan yang baik. Selama proses pelatihan berlangsung, suasana sangat kondusif. Pelatih dapat mengarahkan para peserta (perangkat desa) dengan baik, begitu juga para peserta juga dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Hal ini sangat membantu dalam memperlancar proses pelatihan sehingga hasilnya diharapkan sesuai yang direncanakan.

Saran

1. Perlu adanya sarana prasarana desa karena sarana dan prasarana desa masih sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk berjalanya suatu proses program pemberdayaan masyarakat salah satunya pemberdayaan perangkat desa melalui pelatihan aplikasi Siskeudes ini. Sarana dan prasaran yang kurang yaitu kurangnya peralatan alat elektronik yang dapat digunakan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat desa sehingga terjadi kemungkinan masyarakat desa masih belum menguasai teknologi yang ada

2. Diharapkan adanya Personil aparatur di setiap masing-masing desa karena pada hasil penelitian ini masih sangat terbatas dapat dilihat ketika peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan masih banyak sekali desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang yang belum mempunyai personil yang kemampuannya untuk membimbing masyarakat lainya untuk maju. Didalam Kecamatan hanya ada beberapa orang yang mempunyai personil aparatur desa dan kondisi ini masih dikategorikan keterbatasan
3. Perlunya anggaran biaya untuk bimtek atau pelatihan-pelatihan yang memadai. Masalah terbesar di desa adalah anggaran biaya untuk melaksanakan program bimbingan baik teknologi maupun pelatihan-pelatihan program lainya, karena kita mengetahui untuk bimbingan ataupun pelatihan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit
4. Perlu ditingkatkan koordinasi antar sektor karena salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah adalah masalah koordinasi pemerintah dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan wewenang dari daerah merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Bender, D. (2016). DESA. *Proceedings of the 7th International Workshop on Equation-Based Object-Oriented Modeling Languages and Tools*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Farida, Wanialisa, M., Nursina, Ruwaida, & Wahyuni, N. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(1), 65–73. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/882/670>
- Febriadmadja, H. (2014). Praktik Sosial Dalam Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–50.
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1), 84–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jiap.v4i1.5159>
- Kurniawan, D. A. (2015). Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Keterampilan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 3(4), 1–17.
- <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/11652>
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Pub. L. No. 37 (2007).
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. UNPAD Press.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87–99.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem_Keuangan_Desa_2016_.pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Usman, S., & Habib, A. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Satu Desa Satu Milliar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Studi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan dan Desa Bere-Bere Kec. Morotai Utara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 340. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i2.608>
- Widodo, F. (2018). Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. *JPPM: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 108–121. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/15932>